

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001.

Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Serangan*, Cetakan ke-4, Grup Media Kencana Prenada, Jakarta, 2014.

B. Simanjuntak dan IL. Pasaribu, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1984.

Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.

Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 2014.

Muhammad Mustofa, *Kriminologi*, Fisip UI Press, Jakarta, 2007.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2008.

Rahmawati, L. *Pengaruh Perkembangan Bidang Industri Terhadap Premanisme (Studi Sosio Kriminologi)*. Jurnal Penelitian Hukum Universitas Singaperbangsa, 2002.

R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lengkap Pasal Demi Pasal Serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1996.

R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-13, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

SR. Sianturi, *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni, Jakarta, 2000.

Tim Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-2*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta, 2009.

Rena Yulia, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang tentang Kepolisian Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

A. Jurnal / Karya Ilmiah

Eko Budi S, “Pemberantasan Pungutan Liar Pelayanan Publik dari perspektif Sosiologi Hukum”, *Wajah hukum*, 3(1), 10-19 ISSN 2598-604X (Online) DOI 10.33087/wj.v3il.52, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Haryadi, Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Dalam perspektif Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi*, Maret 2014.
<https://www.neliti.com/id/publication/43288/tinjauan-yuridis-perumusan-sanksi-pidana-bagi-pelaku-tindak-pidana-korupsi-menur>.

Nurmalita Ayuningtyas Harahap, “Pungutan liar yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri ,Undang: Jurnal Hukum ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 2 No.1 (2019): 69-93, DOI: 10.22437/ujh.2.1.69-93 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Rahmi Zilvia, Haryadi, “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan, PAMPAS: *Journal Of Criminal*, Volume 1, Nomor 1, 2020
Rahmi Zilvia, & Haryadi, H. (2020). Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 96-109. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271>.

Ryan Firmanda, *Tindakan Pemerasan Yang Dilakukan Dengan Pengancaman*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Drussalam, Banda Aceh. 2017.

Wendy, Andi Najemi, “Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 1, Nomor 1, 2020.

